

ABSTRAKSI

Kenyataan dalam dunia kerja saat ini, seseorang yang masuk dalam dunia kerja tanpa bermodalkan latar belakang pendidikan, keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut dianggap sebagai tenaga kerja kasar tanpa latar pendidikan dan keahlian. Bila ditinjau dari segi upah yang didapatkan jauh dibawah orang yang memiliki latar belakang pendidikan ketrampilan. Untuk mengantisipasi jangan ada angkatan kerja yang ingin bekerja tanpa bermodalkan skill, maka perlu pembekalan terlebih dahulu. Pembekalan dapat diperoleh di tingkat universitas, akademi atau lembaga pendidikan kejuruan (LPK) non jenjang. khusus untuk lembaga pendidikan kejuruan non jenjang, dalam menyelenggarakan pendidikan & pelatihan memiliki materi dan waktu yang relatif lebih singkat-padat dalam mempersiapkan tenaga kerja yang di dibutuhkan pasar kerja.

Dalam pola dasar pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jelas dicantumkan sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Turunan dari peranan tersebut adalah sebagai penyedia tenaga kerja terdidik dan terlatih di Indonesia. Sebagai kota seni yang sarat dengan barang-barang kerajinan seni, Yogyakarta banyak memasarkan dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi dan sebagainya. Untuk aset barang kerajinan seni tiga dimensi seperti furniture dan kerajinan kayu (handicraft) termasuk produk unggulan eksport. Melihat perkembangan industri furniture yang ada di Yogyakarta saat ini, cocok bila di Yogyakarta muncul LPK Perkayuan. Selama ini Institusi di Yogyakarta yang mendidik tenaga kerja dalam bidang perkayuan saat ini baru ada di BLKPP DIY. Sedang institusi lain belum ada, contohnya Institut Seni Indonesia (ISI) baru memiliki jurusan desain produk dan kriya belum spesifik terhadap masalah perkayuan. Dengan demikian cukup pantas pilihan terhadap kota Yogyakarta yang dalam kaitan ini perlu diadakan LPK Perkayuan yang dapat menampung para angkatan kerja yang dipersiapkan dengan keterampilan sesuai dengan kebutuhan indutsri mebel yang sedang berkembang saat ini Dasar pemikiran pengadaan Lembaga Pendidikan Teknik Perkayuaan (LPTP) merupakan salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah (Dept. Tenaga Kerja) dalam hal penyediaan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan semakin mendesaknya kebutuhan tenaga-tenaga terampil dan ahli untuk menunjang pembangunan nasional, maka perlu ada dukungan secara aktif semua pihak yang terkait, terlebih lagi khususnya bila ada dukungan dari asosiasi atau lembaga-lembaga maupun perusahaan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja teknik perkayuan.

Secara singkat dapat dijelaskan, Lembaga Pendidikan Teknik Perkayuan (LPTP) merupakan tempat pengembangan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan program pendidikan (teori) dan pelatihan (praktek) di bidang perkayuan. Masa studi dan intensitas studi dibidang teknik perkayuan ini di bedakan menjadi dua tingkatan yakni tingkat dasar dan tingkat ahli (terampil). Tujuan dari LPTP ini melatih angkatan tenaga kerja agar mampu bekerja sebagai tenaga ahli dan terampil, sehingga di harapkan dapat berusaha secara mandiri selain dapat bekerja pada orang lain, baik di perusahaan/industri mebel atau pembangunan konstruksi (rumah /gedung). Sebagai wadah lembaga pendidikan, LPTP tidak dapat lepas begitu saja tanpa memiliki acuan dan pegangan pada salah satu instansi pemerintah. Pihak pemerintah yang melindungi dan memberikan pedoman pelaksanaan program kurikulum pendidikan dan pelatihan serta penyediaan tenaga kerja siap pakai yakni Dept. Tenaga Kerja Republik Indonesia.